

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulsyani. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994).
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018).
- Damin, Sudarmin. *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2013).
- Fuad, M., Christin H., Nurlela, Sugiarto, Paulus, dan Y.E.F. *Pengantar Bisnis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000).
- Khairandy, Ridwan. *Pokok-Pokok Pengantar Hukum Dagang Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 1995).
- Subekti. *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Intermasa, 2005).
- Tantri, Francis, Dr. *Pengantar Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Internasional* (Jakarta: Kencana, 2008).

Jurnal

Assah, C. R. "Tinjauan Hukum tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan." *Lex Privatum* 11, no. 5 (2023): 1-11.

Dina, Imas Della Menanda, dan Irvan Anugrah Pratama. "Perspektif Ekologi Administrasi: Pembangunan Insfrastruktur Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung." *Jurnal Ilmiah Neo Politea* 2, no. 1 (2021): 1-11.

Faisal Merdekawan Susanto, dan Firdaus. "Bentuk Kerjasama Operasional (KSO) dalam Pengelolaan Air Minum yang Dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)." *Jurnal Jurist-Diction* 2, no. 6 (2019): 2131-2155.

Fondy Sanjaya, dan Viani Puspita Sari. "Analisis mengenai Dampak Lingkungan Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung dalam Perspektif Environmentalisme." *Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR)* 2, no. 2 (2020): 170-184. doi: [10.24198/padjir.v2i2.2604](https://doi.org/10.24198/padjir.v2i2.2604)

Kurniawan, M. "Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 26, no. 1 (2014): 72-86.

N. K. Disty, P. N. P. Sejati, T. P. Ramadhani, dan V. A. Darida, "Perseroan Terbatas Di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Journal of Social Research* no. 3 No. 4 (2024): 2312-2324.

Pangestu, M. T., dan Aulia, N. "Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia." *Business Law Review* 1, no. 03 (2017): 21-39.

- Raharja, Ivan Fauzani. "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan." *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2013): 117.
- Rambling, N. "Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia." *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013): 72-78.
- Slamet, Sri Redjeki. "Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi." *Lex Jurnalica* 10, no. 2 (2013): 107-120.
- Soerodjo, Irawan. "Joint Venture as a Model of Cooperation in the Infrastructure Projects in Indonesia." *International Journal of Economics and Business Administration* 8, no. 2 (2020): 396-401.
- Sukananda, S., dan Mudiparwanto, W. A. "Analisis Pengaturan Penanaman Modal Asing dalam Bentuk Perusahaan Joint Venture di Indonesia." *Diversi* 5, no. 2 (2020): 371-463.
- Sutrisno, B. "Tanggung Jawab Yuridis Perusahaan Dalam Perusahaan Kelompok Menurut Sistem Hukum Perusahaan Indonesia." *Jatiswara* 34, no. 3 (2019): 283-293.
- Syafi'i Putra, Kobar Bumi Merah, Danastri Puspitasari, I Putu Arya Pandu Saka Rai, Hilda Lukito, dan Brian Rachmadian Cahyautama. "Hubungan Hukum Dan Tanggung Gugat Anggota Konsorsium Dalam Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO)." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2055-2065.
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.931>.

Yamin, M., dan Windymadaksa, S. "Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung sebagai mercusuar hubungan Indonesia-Tiongkok." *Jurnal Politik Profetik* 5, no. 2 (2017): 200-218.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah Untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kereta Api Cepat Kecepatan Tinggi.

Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham.

Artikel Internet

Adrian. 2022. "Deretan Persoalan Kereta Cepat: Jangan Bernasib Kayak Hambalang." Diakses Pada 14 Maret 2024. <https://tirto.id/deretan-persoalan-kereta-cepat-jangan-bernasib-kayak-hambalang-gz5G>.

KCIC. 2019. "Percepatan Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, PT. KCIC dan PT. PSBI Kebut Sisa Pengadaan Lahan." Diakses Pada 24 Februari 2024. <https://kcic.co.id/kcic-siaran-pers/percepatan-proyek-kereta-cepat-jakarta-bandung-pt-kcic-dan-pt-psbi-kebut-sisa-pengadaan-lahan/>.

KCIC. "Tentang Kami - Profil." Diakses Pada 24 Februari 2024. <https://kcic.co.id/tentang-kami/profil/>.

Redaksi. 2023. "Protes, Puluhan Warga Tegalnangklak Duduki Proyek KCIC." Diakses Pada 14 Maret 2024. <https://jabar.idntimes.com/news/jabar/abdul-halim-18/tuntut-ganti-rugi-rumah-warga-tutup-terowongan-proyek-kereta-cepat>.